Dr. Drs. Aminul Amin, MM., CPA., CTA.

Buku Referensi

Bundle of Governance

Dewan Komisaris, Komite Audit, Auditor, dan Perlindungan Investor



Bundle of Governance

Dewan Komisaris, Komite Audit, Auditor, dan Perlindungan Investor

Dr. Drs. Aminul Amin, MM., CPA., CTA.

Penerbit Widina

BUNDLE OF GOVERNANCE:
DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, AUDITOR, DAN PERLINDUNGAN INVESTOR

Penulis:
Dr. Drs. Aminul Amin, MM., CPA., CTA

Desain Cover:
Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Neneng Sri Wahyuni

ISBN:
978-634-317-040-2

Cetakan Pertama:
Oktober, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul "*Bundle of governance*: Dewan Komisaris, Komite Audit, Auditor, dan Perlindungan Investor" ini dapat disusun sebagai upaya untuk memperkaya kajian mengenai tata kelola perusahaan, kualitas laba, audit, dan perlindungan investor dalam konteks pasar modal Indonesia.

Buku ini lahir dari kesadaran bahwa *corporate governance* tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar pemenuhan regulasi atau kewajiban administratif perusahaan publik. Tata kelola perusahaan merupakan sistem pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban yang menentukan bagaimana perusahaan diarahkan, bagaimana keputusan strategis dibuat, bagaimana informasi keuangan disajikan, serta bagaimana hak investor dilindungi. Dalam pasar modal yang semakin berkembang, kebutuhan terhadap tata kelola yang kuat menjadi semakin mendesak karena investor membutuhkan informasi yang kredibel, transparan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Salah satu gagasan utama dalam buku ini adalah bahwa perlindungan investor tidak cukup hanya bertumpu pada satu mekanisme tata kelola. Dewan Komisaris, Komite Audit, auditor eksternal, pengendalian internal, keterbukaan informasi, struktur kepemilikan, dan pengawasan regulator tidak dapat bekerja secara terpisah. Seluruh mekanisme tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Pendekatan inilah yang dalam buku ini disebut sebagai *bundle of governance*, yaitu kumpulan mekanisme tata kelola yang bekerja secara bersama-sama untuk memperkuat kualitas pengawasan, menekan risiko manajemen laba, meningkatkan kualitas laba, dan melindungi kepentingan investor.

Buku ini juga menempatkan kualitas laba sebagai isu sentral. Laba merupakan salah satu informasi utama yang digunakan investor dalam menilai kinerja dan prospek perusahaan. Namun, laba yang tinggi tidak selalu menunjukkan kinerja yang baik apabila tidak didukung oleh kualitas pelaporan yang memadai. Laba dapat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi,

estimasi manajemen, tekanan pasar, insentif kompensasi, maupun kepentingan pemegang saham pengendali. Oleh karena itu, kualitas laba perlu diawasi melalui mekanisme tata kelola yang kuat, terutama melalui peran Dewan Komisaris, Komite Audit, dan auditor eksternal.

Dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai *corporate governance* memiliki kekhasan tersendiri. Banyak perusahaan publik memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, baik pada keluarga, kelompok usaha, negara, maupun pemegang saham pengendali tertentu. Kondisi ini membuat persoalan tata kelola tidak hanya berkaitan dengan konflik antara manajemen dan pemegang saham, tetapi juga dengan potensi konflik antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Oleh sebab itu, perlindungan investor di Indonesia perlu dilihat secara lebih luas, yaitu sebagai upaya menjaga agar seluruh pemegang saham memperoleh perlakuan yang adil, informasi yang memadai, dan perlindungan dari potensi ekspropriasi.

Buku ini disusun untuk mahasiswa, dosen, peneliti, auditor, regulator, praktisi perusahaan, dan investor yang ingin memahami hubungan antara tata kelola perusahaan, kualitas laba, audit, kepemilikan terkonsentrasi, dan perlindungan investor. Gaya penulisan dalam buku ini diupayakan tetap akademik, tetapi mudah dipahami oleh pembaca yang belum memiliki latar belakang teknis mendalam di bidang akuntansi, audit, atau pasar modal. Konsep-konsep seperti teori agensi, informasi asimetri, manajemen laba, discretionary accruals, audit quality, entrenchment, ekspropriasi, dan *corporate governance* ratings dijelaskan secara bertahap agar dapat dipahami secara konseptual maupun praktis.

Struktur buku ini dimulai dari pengantar mengenai urgensi tata kelola perusahaan dan perlindungan investor, kemudian dilanjutkan dengan fondasi teoritis mengenai teori agensi, informasi asimetri, dan *corporate governance*. Selanjutnya, buku ini membahas konsep *bundle of governance*, lanskap *corporate governance* di Indonesia, peran Dewan Komisaris, Komite Audit, auditor eksternal, serta interaksi antar mekanisme pengawasan. Pembahasan kemudian diarahkan pada manajemen laba dan kualitas laba, kepemilikan terkonsentrasi, *corporate governance* ratings, nilai perusahaan, hak investor, dan diakhiri dengan model integratif serta implikasi kebijakan perlindungan investor.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman mengenai tata kelola perusahaan di Indonesia. Bagi kalangan akademik, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengajaran dan penelitian mengenai *corporate governance*, audit, dan kualitas laba. Bagi praktisi, buku ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi untuk memperkuat fungsi pengawasan internal dan eksternal perusahaan. Bagi regulator, buku ini diharapkan dapat memperkaya perspektif mengenai pentingnya perlindungan investor dalam pasar modal. Bagi investor, buku ini diharapkan dapat membantu memahami bahwa keputusan investasi tidak cukup hanya didasarkan pada angka laba, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas tata kelola dan kredibilitas informasi keuangan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Kajian mengenai *corporate governance* terus berkembang seiring perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dinamika pasar modal, dan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi serta keberlanjutan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini pada masa mendatang.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi bagian kecil dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan, kualitas pelaporan keuangan, dan perlindungan investor di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
PENDAHULUAN ..... **x**
BAB 1 PENGANTAR *BUNDLE OF GOVERNANCE* DAN PERLINDUNGAN INVESTOR **1**
A. Urgensi Tata Kelola Perusahaan dalam Pasar Modal Indonesia 1
B. Kualitas Laba sebagai Dasar Keputusan Investor 4
C. Dari Single Mechanism Menuju *Bundle of governance* 7
D. Ruang Lingkup Buku: Dewan Komisaris, Komite Audit, Auditor, dan Investor 10
BAB 2 FONDASI TEORITIS: AGENSI, INFORMASI ASIMETRI, DAN TATA KELOLA **15**
A. Teori Agensi dan Pergeseran Konflik Keagenan 15
B. Informasi Asimetri, Moral Hazard, dan Manajemen Laba 19
C. *Corporate governance* sebagai Mekanisme Pengendalian 23
BAB 3 KONSEP *BUNDLE OF GOVERNANCE* **27**
A. Makna *Bundle of governance* dalam Mekanisme Monitoring 28
B. Hubungan Substitusi dan Komplementer Antar Mekanisme Tata Kelola 30
C. Interaksi Mekanisme Internal dan Eksternal Perusahaan 34
D. Relevansi *Bundle governance* bagi Negara dengan Kepemilikan Terkonsentrasi 37
BAB 4 LANSKAP *CORPORATE GOVERNANCE* DI INDONESIA **41**
A. Reformasi *Corporate governance* Pascakrisis Ekonomi 42
B. Model Insider dan Outsider dalam Konteks Indonesia 45
C. Kepemilikan Keluarga, Konsentrasi Kontrol, dan Pasar Modal 48
BAB 5 DEWAN KOMISARIS SEBAGAI MEKANISME MONITORING INTERNAL **55**
A. Peran Dewan Komisaris dalam Pengawasan dan Pemberian Nasihat 56

B. Independensi Dewan Komisaris dan Kualitas Laba 59
C. Keahlian Keuangan, Ukuran Dewan, dan Efektivitas Pengawasan 62
D. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris: Formalitas atau Efektivitas 65
BAB 6 KOMITE AUDIT DALAM ARSITEKTUR PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN 71
A. Posisi Komite Audit sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris 72
B. Independensi Komite Audit dan Monitoring Manajemen Laba 75
C. Keahlian, Ukuran, dan Rapat Komite Audit dalam Penguatan Kualitas Pelaporan 79
BAB 7 AUDITOR EKSTERNAL DAN KUALITAS AUDIT 85
A. Auditor sebagai Mekanisme Governance Eksternal 86
B. Independensi Auditor dan Fungsi Assurance atas Laporan Keuangan 88
C. Spesialisasi Industri Auditor dan Reputasi Big Four 91
D. Kualitas Audit sebagai Pelindung Kredibilitas Informasi Laba 93
BAB 8 INTERAKSI DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN AUDITOR 97
A. Board Auditor Interaction dalam Monitoring Manajemen Laba 99
B. Komite Audit Auditor Interaction dalam Penguatan Kualitas Laba 102
C. Pola Komplementer antara Pengawasan Internal dan Audit Eksternal 106
BAB 9 MANAJEMEN LABA DAN KUALITAS LABA SEBAGAI FOKUS MONITORING 113
A. Konsep Laba, Kualitas Laba, dan Discretionary Accruals 115
B. Manajemen Laba Oportunistik dan Risiko Misrepresentasi 117
C. Kualitas Laba, Opini Audit, Biaya Modal, dan Respons Pasar 120
D. Model Pengukuran Kualitas Laba dalam Riset Governance 123
BAB 10 KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI, ENTRENCHMENT, DAN EKSPROPRIASI 129
A. Karakteristik Kepemilikan Terkonsentrasi di Indonesia 130

B. Pemegang Saham Pengendali dan
Pergeseran Konflik Mayoritas Minoritas 133
C. Efek Alignment dan Entrenchment
dalam Tata Kelola Perusahaan 137
**BAB 11 *CORPORATE GOVERNANCE* RATINGS,
NILAI PERUSAHAAN, DAN HAK INVESTOR 143**
A. Indeks dan Rating *Corporate governance*
sebagai Alat Penilaian Investor..... 145
B. Transparansi, Disclosure, dan
Hak Pemegang Saham Minoritas..... 148
C. Kualitas Laba sebagai Pemoderasi
Hubungan Governance dan Nilai Perusahaan 152
D. Perlindungan Investor dalam
Keputusan Investasi Jangka Panjang 155
**BAB 12 MODEL INTEGRATIF DAN IMPLIKASI
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN INVESTOR.....159**
A. Sintesis Model *Bundle of governance*
Berbasis Konteks Indonesia..... 160
B. Implikasi bagi Perusahaan, Auditor, Regulator, dan Investor 164
C. Agenda Riset Lanjutan: Ultimate
Ownership, Disclosure, dan Efektivitas Monitoring..... 167
DAFTAR PUSTAKA.....173

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model konseptual *bundle of governance* 27
Gambar 4.1 Model konseptual lanskap
corporate governance Indonesia 41
Gambar 5.1 Model konseptual Dewan Komisaris
sebagai mekanisme monitoring internal 55
Gambar 6.1 Model konseptual Komite Audit
sebagai penjaga kualitas pelaporan 71
Gambar 7.1 Model konseptual auditor eksternal dan fungsi assurance 85
Gambar 8.1 Model konseptual interaksi antar mekanisme pengawasan 97
Gambar 9.1 Model konseptual manajemen laba dan kualitas laba 113
Gambar 10.1 Model konsep efek alignment dan
entrenchment dalam tata kelola 129
Gambar 11.1 Model konseptual *corporate governance* ratings,
kualitas laba, dan nilai perusahaan 143
Gambar 12.1 Model kebijakan tata kelola yang baik
untuk perlindungan investor 159

BAB 1

PENGANTAR *BUNDLE OF GOVERNANCE* DAN PERLINDUNGAN INVESTOR

A. URGENSI TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM PASAR MODAL INDONESIA

Pasar modal dibangun di atas kepercayaan. Setiap keputusan investasi, baik yang dilakukan oleh investor ritel maupun investor institusional, selalu mengandung unsur kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Investor membeli saham karena percaya bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar. Investor menahan saham karena percaya bahwa manajemen bekerja untuk meningkatkan nilai perusahaan. Investor juga bersedia menanggung risiko karena percaya bahwa ada sistem pengawasan yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan di dalam perusahaan. Oleh karena itu, pasar modal tidak dapat dipahami hanya sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran efek. Pasar modal juga merupakan ruang kelembagaan yang membutuhkan aturan, etika, transparansi, dan mekanisme pengawasan.

Dalam konteks inilah *corporate governance* atau tata kelola perusahaan menjadi sangat penting. Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lain dalam proses pengarahan dan pengendalian perusahaan. Prinsip ini menempatkan perusahaan bukan hanya sebagai entitas ekonomi yang mengejar laba, melainkan juga sebagai entitas hukum dan sosial yang bertanggung jawab kepada pihak pihak yang

BAB 2

FONDASI TEORITIS: AGENSI, INFORMASI ASIMETRI, DAN TATA KELOLA

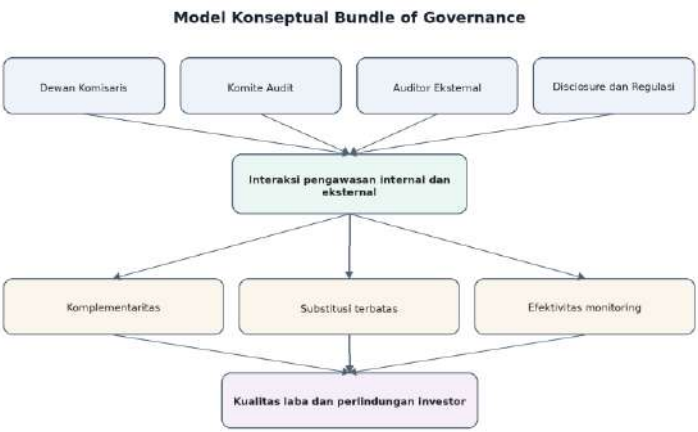
A. TEORI AGENSI DAN PERGESERAN KONFLIK KEAGENAN

Pembahasan mengenai *corporate governance* tidak dapat dilepaskan dari teori agensi. Teori ini menjadi salah satu fondasi utama untuk memahami mengapa perusahaan membutuhkan mekanisme pengawasan. Dalam perusahaan modern, pemilik modal tidak selalu mengelola perusahaan secara langsung. Pemilik modal menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada manajemen yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan akses operasional lebih besar. Hubungan ini menciptakan pembagian peran antara pihak yang memiliki sumber daya ekonomi dan pihak yang menjalankan keputusan bisnis sehari hari. Secara sederhana, pemegang saham menyediakan modal, sedangkan manajemen menggunakan modal tersebut untuk menjalankan perusahaan.

Masalah muncul karena pihak yang diberi kepercayaan belum tentu selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pihak yang memberi kepercayaan. Manajemen dapat memiliki tujuan pribadi, seperti mempertahankan jabatan, memperoleh bonus, meningkatkan reputasi, memperbesar kekuasaan, atau menghindari tekanan dari pasar. Pemegang saham, sebaliknya, mengharapkan peningkatan nilai perusahaan, pembagian hasil yang wajar, serta penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien. Ketika kepentingan kedua pihak tidak sepenuhnya sama, muncullah konflik keagenan.

BAB 3

KONSEP *BUNDLE OF GOVERNANCE*



Gambar 3.1 Model konseptual bundle of governance.

Model pada Gambar 3.1 menegaskan bahwa *bundle of governance* tidak dipahami sebagai kumpulan organ yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konfigurasi mekanisme yang saling berinteraksi. Dewan Komisaris, Komite Audit, auditor eksternal, pengungkapan, dan regulasi membentuk sistem monitoring yang dapat bekerja secara komplementer maupun substitutif secara terbatas. Efektivitas sistem tersebut pada akhirnya dinilai melalui kemampuannya menekan informasi asimetri, memperkuat kualitas laba, dan meningkatkan perlindungan investor.

BAB 4

LANSKAP *CORPORATE GOVERNANCE* DI INDONESIA

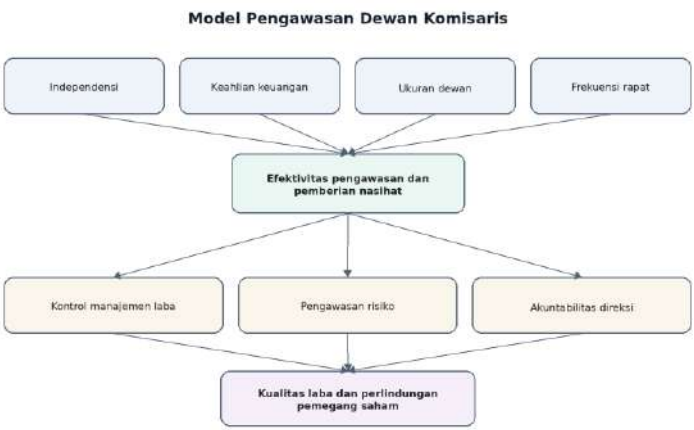


Gambar 4.1 Model konseptual lanskap corporate governance Indonesia.

Model pada Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa lanskap *corporate governance* Indonesia dibentuk oleh sejarah reformasi pascakrisis, karakter model insider, kepemilikan keluarga, dan konsentrasi kontrol. Keempat unsur tersebut menciptakan konteks kelembagaan yang khas sehingga perlindungan investor tidak cukup hanya bertumpu pada kepatuhan formal. Tata kelola harus diarahkan untuk memperkuat transparansi, mencegah ekspropriasi, dan memastikan perlakuan yang adil bagi pemegang saham minoritas.

BAB 5

DEWAN KOMISARIS SEBAGAI MEKANISME MONITORING INTERNAL



Gambar 5.1 Model konseptual Dewan Komisaris sebagai mekanisme monitoring internal.

Model pada Gambar 5.1 menunjukkan bahwa efektivitas Dewan Komisaris dipengaruhi oleh independensi, keahlian keuangan, ukuran dewan, dan frekuensi rapat. Keempat atribut tersebut tidak cukup dinilai sebagai indikator administratif, tetapi perlu dilihat sebagai kapasitas substantif untuk mengawasi Direksi, mengevaluasi risiko pelaporan, dan menekan peluang manajemen laba. Dewan Komisaris yang efektif menjadi simpul awal dalam perlindungan investor karena ia menghubungkan kepentingan pemegang saham dengan kualitas pengawasan perusahaan.

BAB 6

KOMITE AUDIT DALAM ARSITEKTUR PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN

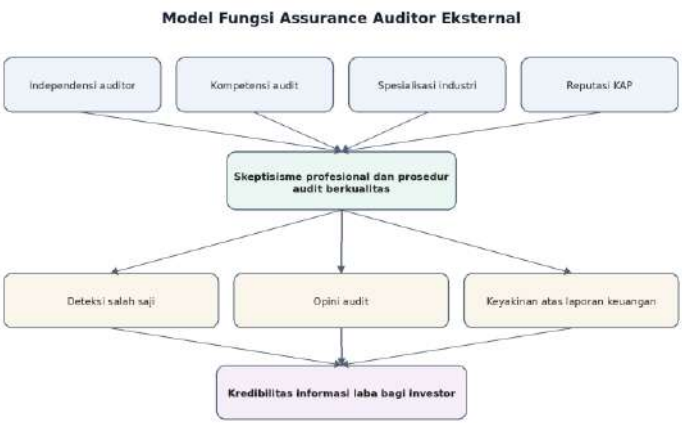


Gambar 6.1 Model konseptual Komite Audit sebagai penjaga kualitas pelaporan.

Model pada Gambar 6.1 menempatkan Komite Audit sebagai mekanisme pendalaman pengawasan atas laporan keuangan. Independensi, keahlian akuntansi, intensitas rapat, dan komunikasi dengan auditor merupakan prasyarat agar Komite Audit mampu mengidentifikasi estimasi akuntansi agresif, menilai kualitas pengendalian internal, serta memastikan tindak lanjut atas temuan audit. Dengan demikian, Komite Audit memperkuat kualitas pelaporan bukan hanya melalui keberadaannya, tetapi melalui aktivitas monitoring yang terdokumentasi dan berkelanjutan.

BAB 7

AUDITOR EKSTERNAL DAN KUALITAS AUDIT



Gambar 7.1 Model konseptual auditor eksternal dan fungsi assurance.

Model pada Gambar 7.1 memperlihatkan bahwa kualitas audit dibangun dari kombinasi independensi auditor, kompetensi profesional, spesialisasi industri, reputasi kantor akuntan publik, dan penerapan skeptisisme profesional. Fungsi assurance auditor eksternal menjadi bernilai bagi investor apabila prosedur audit mampu mendeteksi risiko salah saji material, menilai kewajaran estimasi akuntansi, dan memberikan opini yang meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor eksternal harus dipahami sebagai bagian dari *bundle of governance* yang melengkapi pengawasan internal.

BAB 8

INTERAKSI DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN AUDITOR

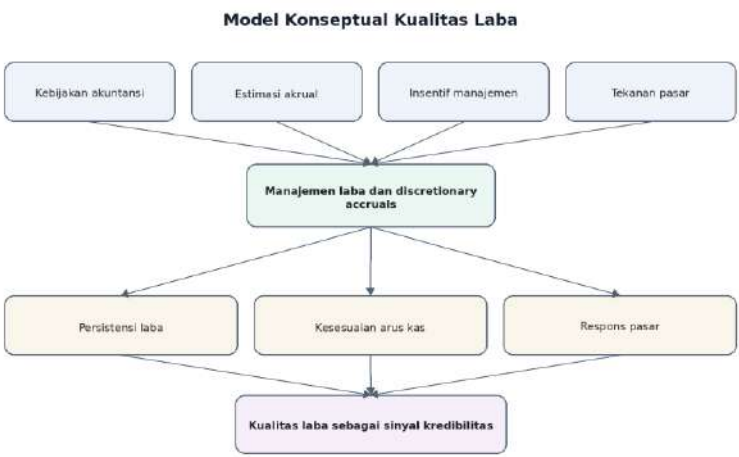


Gambar 8.1 Model konseptual interaksi antar mekanisme pengawasan.

Model pada Gambar 8.1 menjelaskan bahwa interaksi antara Dewan Komisaris, Komite Audit, auditor eksternal, dan audit internal merupakan jalur penting dalam pengendalian risiko pelaporan. Interaksi tersebut dapat berupa pertukaran informasi, pembahasan temuan audit, evaluasi pengendalian internal, dan tindak lanjut atas indikasi manajemen laba. Semakin kuat koordinasi antar mekanisme pengawasan, semakin besar peluang perusahaan menghasilkan laba yang kredibel dan laporan keuangan yang dapat dipercaya investor.

BAB 9

MANAJEMEN LABA DAN KUALITAS LABA SEBAGAI FOKUS MONITORING



Gambar 9.1 Model konseptual manajemen laba dan kualitas laba.

Model pada Gambar 9.1 menegaskan bahwa kualitas laba dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi, estimasi akrual, insentif manajemen, dan tekanan pasar. Unsur-unsur tersebut dapat mendorong praktik manajemen laba, terutama melalui discretionary accruals. Dalam riset governance, kualitas laba lazim dianalisis dengan melihat sejauh mana laba didukung oleh arus kas, memiliki persistensi, serta tidak terlalu dipengaruhi oleh akrual diskresioner yang bersifat oportunistik.

BAB 10

KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI, ENTRENCHMENT, DAN EKSPROPRIASI



Gambar 10.1 Model konsep efek alignment dan entrenchment dalam tata kelola.

Model pada Gambar 10.1 menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi memiliki dua konsekuensi yang berbeda. Efek alignment muncul ketika pemegang saham pengendali memiliki insentif ekonomi untuk mengawasi manajemen sehingga biaya agensi menurun dan nilai perusahaan meningkat. Sebaliknya, efek entrenchment muncul ketika pengendali menggunakan kekuasaannya untuk mempertahankan kontrol, mengarahkan keputusan perusahaan, atau memperoleh manfaat privat

BAB 11

CORPORATE GOVERNANCE RATINGS, NILAI PERUSAHAAN, DAN HAK INVESTOR

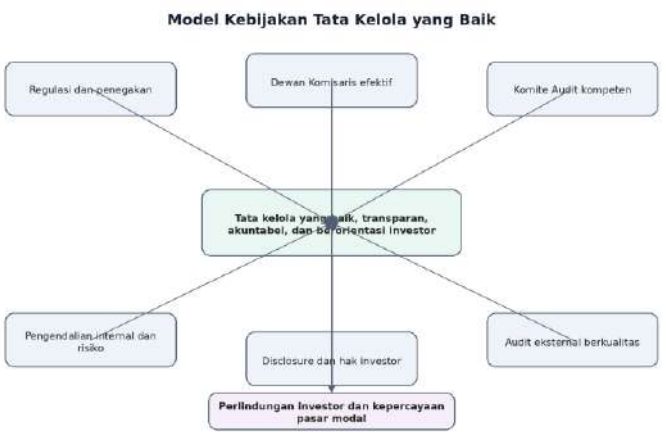


Gambar 11.1 Model konseptual corporate governance ratings, kualitas laba, dan nilai perusahaan.

Model pada Gambar 11.1 memperlihatkan bahwa *corporate governance* ratings dapat dipahami sebagai sinyal kualitas tata kelola yang dinilai melalui dimensi dewan, disclosure, hak pemegang saham, dan kualitas audit. Rating yang lebih baik diharapkan menurunkan persepsi risiko investor dan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, hubungan tersebut menjadi lebih kuat apabila kualitas laba juga tinggi, karena laba yang kredibel membuat sinyal governance lebih dapat dipercaya oleh pasar.

BAB 12

MODEL INTEGRATIF DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN INVESTOR



Gambar 12.1 Model kebijakan tata kelola yang baik untuk perlindungan investor.

Model pada Gambar 12.1 merangkum arah kebijakan tata kelola yang baik dalam konteks pasar modal Indonesia. Kebijakan governance perlu menggabungkan regulasi dan penegakan, efektivitas Dewan Komisaris, kompetensi Komite Audit, kualitas audit eksternal, pengendalian internal, disclosure, serta perlindungan hak investor. Model ini menekankan bahwa kebijakan tata kelola tidak cukup hanya memperbaiki satu unsur, melainkan harus membangun ekosistem pengawasan yang saling mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. W., dkk. (2024). *Earnings quality: The role of audit committee, independent board of commissioners, and institutional ownership*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

ACGA. (2023). *CG Watch 2023: Corporate governance in Asia Pacific*. Asian *Corporate governance* Association.

Alzoubi, E. S. S., dkk. (2022). On the interrelation between *corporate governance*, audit, and earnings quality: A review of the underpinning theories. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 12*(4), 631–646.

ASEAN Capital Markets Forum. (2023). *ASEAN Corporate governance Scorecard: Revised 2023*. ASEAN Capital Markets Forum.

Bae, G. S., dkk. (2023). Auditor changes and earnings management. *Journal of Business Ethics*. https://doi.org/10.1007/s10551-023-05453-6

Candriam. (2023). *Corporate governance in emerging markets: What is behind the curtain?* Candriam.

CAQ, & Deloitte. (2024). *Audit committee practices report: Common threads across audit committees*. Center for Audit Quality and Deloitte.

Dewi, S. (2021). The legal framework of family business in Indonesia. *Indonesia Law Review, 6*(2).

Dickinson, V., dkk. (2023). Accruals quality, firm life cycle, and earnings management. *Journal of Accounting and Public Policy*.

Hasan, M. M., dkk. (2024). Earnings management in emerging economies: A review and future research agenda. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*.

Herusetya, A. (2022). Is audit quality of Big 4 firms higher than mid tier firms? Study of going concern opinion and auditor reporting accuracy in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.

Hsu, C., & Liao, C. (2022). Audit partner industry specialization and real earnings management. *Review of Quantitative Finance and Accounting*. https://doi.org/10.1007/s11156-022-01106-3

IAASB. (2024). *Handbook of international quality management, auditing, review, other assurance, and related services pronouncements: Volume 2*. International Auditing and Assurance Standards Board.

IAASB. (2024). *Handbook of international quality management, auditing, review, other assurance, and related services pronouncements: Volume 4*. International Auditing and Assurance Standards Board.

IAASB. (2024). *Elevating trust in audit and assurance: IAASB strategy and work plan 2024–2027*. International Auditing and Assurance Standards Board.

ICGN. (2024). *ICGN investor viewpoint: The governance of controlled companies*. International *Corporate governance* Network.

IESBA. (2024). *Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards*. International Ethics Standards Board for Accountants.

IFRS Foundation. (2021). *Conceptual framework for financial reporting*. IFRS Foundation.

Khatib, S. F. A., dkk. (2022). Board attributes and corporate outcomes: A systematic literature review. *Corporate governance: The International Journal of Business in Society*.

KPMG. (2021). *Audit committee guide: Indonesian edition*. KPMG Indonesia.

Liu, X., & Liang, X. (2024). Moral language and real earnings management: Evidence from management discussion and analysis. *Heliyon, 10*(19).

Maulida, N., dkk. (2024). Earnings quality, good *corporate governance*, audit quality, and firm value: Evidence from cyclical and non cyclical companies in Indonesia. *Sentralisasi: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

OECD. (2023). *G20/OECD principles of corporate governance 2023*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ed750b30-en

OECD. (2023). *OECD corporate governance factbook 2023*. OECD Publishing.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pasar modal Indonesia 2023–2027*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang pengomunikasian Hal Audit Utama dalam laporan Akuntan Publik atas laporan keuangan yang diaudit di pasar modal*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015a). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015b). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Otoritas Jasa Keuangan.

Pamungkas, I. D., dkk. (2023). *Corporate governance*, financial performance, and firm value: Evidence from Indonesia. *WSEAS Transactions on Business and Economics, 20*, 1616–1627.

Panayi, E., dkk. (2021). *Corporate governance* bundles and firm outcomes: A configurational approach. *Corporate governance: An International Review, 29*(5), 402–424.

PCAOB. (2022). *2022 annual report*. Public Company Accounting Oversight Board.

PCAOB. (2024). *Audit focus: Audit committee communications*. Public Company Accounting Oversight Board.

PwC Indonesia. (2024). *Legal alert: New reporting requirements for share ownership in public companies*. PwC Indonesia.

Rahayu, S., dkk. (2024). Board independence, audit committee, and earnings management in Indonesian banking. *Banks and Bank Systems, 19*(4), 289–300.

Rizki, M., dkk. (2024). Audit quality and real earnings management: Evidence from Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research, 14*(2), 137–151.

Setiawati, L., dkk. (2022). Family aligned board, *corporate governance*, and firm performance: Evidence from Indonesia. *Problems and Perspectives in Management, 20*(4), 14–25.

Singapore Institute of Directors. (2023). *ASEAN Corporate governance Scorecard*. Singapore Institute of Directors.

Tekin, H., & Polat, A. Y. (2020). Agency theory: A review in finance and *corporate governance* research. *Journal of Accounting and Finance Studies, 1323–1338*.

Tokyo Stock Exchange. (2024). *Enhancing disclosure regarding protection of minority shareholders and group management*. Tokyo Stock Exchange.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. (2024). *Audit committee guide 2024*. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Wedari, L. K., dkk. (2022). The role of the audit committee in accounting and finance expertise on earnings quality. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.

Buku Referensi

Bundle of Governance

Dewan Komisaris, Komite Audit, Auditor, dan Perlindungan Investor

Buku Bundle of Governance: Dewan Komisaris, Komite Audit, Auditor, dan Perlindungan Investor membahas pentingnya tata kelola perusahaan dalam menciptakan kualitas pelaporan keuangan yang andal serta perlindungan bagi investor di pasar modal Indonesia. Buku ini menguraikan bagaimana dewan komisaris, komite audit, dan auditor eksternal tidak lagi dipahami sebagai mekanisme yang bekerja sendiri-sendiri, melainkan sebagai suatu bundle of governance yang saling melengkapi dalam mengawasi manajemen dan menjaga kredibilitas informasi laba.

Melalui pendekatan teoritis dan kontekstual, buku ini menjelaskan hubungan antara teori agensi, informasi asimetri, manajemen laba, dan corporate governance dalam lingkungan bisnis Indonesia yang ditandai oleh kepemilikan terkonsentrasi dan dominasi pemegang saham pengendali. Pembahasan mencakup efektivitas dewan komisaris, independensi komite audit, kualitas audit eksternal, hingga interaksi antar mekanisme governance dalam mengurangi risiko ekspropriasi dan meningkatkan kualitas laba perusahaan.

Selain memberikan landasan akademik yang kuat, buku ini juga menawarkan implikasi praktis bagi perusahaan, regulator, auditor, investor, dan peneliti. Dengan menyoroti relevansi kualitas laba, transparansi, dan perlindungan hak pemegang saham minoritas, buku ini menjadi referensi penting bagi pembaca yang ingin memahami dinamika tata kelola perusahaan modern serta tantangan perlindungan investor di negara berkembang, khususnya Indonesia.



Dr. Drs. Aminul Amin, MM., CPA, CTA. lahir di Jombang, 7 Maret 1963. Penulis adalah seorang akademisi, peneliti, dan prakatisi bidang akuntansi, keuangan, auditing dan perpajakan. Penulis bekerja di STIE Malangkucecwara (ABM) Malang sebagai dosen tetap jurusan/program studi akuntansi. Jabatan strutural sebagai Direktur Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) dan CPA Test Center STIE Malangkucecwara/ABM Malang. Penulis menyelesaikan studi S1 Jurusan Adminstrasi Bisnis, S1 Jurusan Akuntansi, S2 Jurusan Magister Manajemen (Keuangan), S3 Jurusan Akuntansi (Keuangan). Penulis pernah menempuh pendidikan profesi penilai bisnis dan profesi akuntan publik yang bergelar CPA. Selain sebagai dosen, penulis aktif menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Penulis juga aktif sebagai konsultan individu bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, pengelolaan aset, dan investasi di beberapa entitas bisnis dan pemerintah daerah.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Ekonomi

ISBN 978-634-317-040-2

9 786343 170402